

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020-2022

Andre Kurniawan Saputra \*<sup>1</sup>

Dina Rahmadani <sup>2</sup>

Diaz Wahyu Syahputra <sup>3</sup>

Indah Sukmawati <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Sarana Informatika

\*e-mail : [andrekurniawansaputra05@gmail.com](mailto:andrekurniawansaputra05@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratna.puspita.sari1012@gmail.com](mailto:ratna.puspita.sari1012@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[diazwahyu59840@gmail.com](mailto:diazwahyu59840@gmail.com)<sup>3</sup>, [indahsukmawati985@gmail.com](mailto:indahsukmawati985@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pertumbuhan pendapatan Kota Bogor selama periode 2020-2022, menilai kinerja belanja daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan, mengevaluasi kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola deficit atau surplus anggaran, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil analisis yang ditemukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder yang didapat dari LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022 melalui website pemerintah Kota Bogor. Data dianalisis menggunakan analisis varian pendapatan, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020 – 2022 dapat dikatakan baik dilihat dari rata-rata varians pendapatan daerah sebesar 102,67%, rata-rata tingkat kemandirian daerah yang masih rendah sebesar 39,25%, rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 111,63%, dan rata-rata rasio efisiensi PAD sebesar 93,57%.

**Kata Kunci :** APBD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah

### Abstract

The aim of this research is to examine the income growth of Bogor City during the 2020 – 2022 period, assess regional spending performance as well as effectiveness and efficiency in achieving development goals, evaluate the ability of Bogor City government to manage budget deficits or surpluses, and provide recommendations for improving regional financial performance based on analysis results found. The research method used in this research is quantitative descriptive method, with secondary data obtained from the BOGOR CITY GOVERNMENT BUDGET REALIZATION REPORT FOR THE 2020 – 2022 BUDGET YEAR via the Bogor City government website. Data were analyzed using income variance analysis, regional independence ratio, effectiveness regional ratio to original income regions, and regional financial efficiency ratios. The result of this research show that the financial performance of the Bogor City Regional Revenue and Expenditure Budget for 2020 – 2022 can be said to be good, seen from the average regional income variance is 102,67%, the average level of regional independence which is still low at 39,25%, the average PAD effectiveness ratio is 111,63%, and the average PAD efficiency ratio is 93,57%.

**Keywords :** APBD, Financial Performance, Regional Financial Ratios

### PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 38 propinsi. Sistem pemerintahan sentralisasi di Indonesia diubah menjadi sistem pemerintahandentralisasi karena wilayahnya yang lebih besar. Tujuannya adalah agar pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan dapat mengawasi dan mengatur kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dengan autonomi, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mengelola sumber daya finansial guna mencapai tujuan pembangunan. Kinerja keuangan APBD mencerminkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan dana publik. Kota Bogor, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat, memiliki

APBD yang signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan APBD Kota Bogor pada periode 2020-2022 menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan di tengah kondisi yang penuh tantangan ini.

Menurut Mahmudi (2020) laporan keuangan daerah sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah secara seluruhan dan unit-unit didalamnya Oleh karena itu, pengukuran penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dapat memulihkan kinerja dengan adanya pembandingan dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji pertumbuhan pendapatan Kota Bogor selama periode 2020-2022. Menilai kinerja belanja daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan. Mengevaluasi kemampuan pemerintah Kota Bogor dalam mengelola deficit atau surplus anggaran. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil analisis yang ditemukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pemerintahan**

Suparna (2018:258) dalam (Rawis et al., 2020) Akuntansi pemerintahan meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini. Riyanto (2015:3) mengatakan Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang memiliki karakteristik khususnya diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Rawis et al., 2020).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81) dalam (Alfiani et al., 2021), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Menurut BPK RI yang dikutip dalam Kompas (2019), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mencerminkan manajemen keuangan daerah serta anggaran bisa menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya (Alfiani et al., 2021).

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Halim & Kusufi (2014) dalam (Sejahtera & Kabupaten, 2024) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Sumarjo Kinerja keuangan pada pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Nurulafifah ,2012:3 dalam Krisniawati et al., 2021). Kinerja keuangan merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi (Zuhdi et al., 2016).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Mamesa (1995) Keuangan daerah dapat diartika sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh

negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Halim,2007:23 dalam Machmoed et al., 2021).

## METODE

Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok (Darmawan, 2020).

Data-data yang digunakan penelitian ini didapat dari LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022 melalui website pemerintah kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Berikut analisis data yang digunakan pada penelitian ini:

### a. Varians pendapatan

Menurut Fitra (2019) Analisis Varians Pendapatan-LRA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dengan yang dianggarkan (Fitra & Efendi, 2020). Berikut rumusnya:

$$\text{Analisis Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } x}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } x} \times 100\%$$

**Tabel 1** Skala Varians Pendapatan

Skala Interval	Kemampuan Keuangan
>100	Baik
<100	Kurang Baik

Sumber: (Tyas & Rani, 2022)

### b. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal(Awani & Hariani, 2021). Makin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Faud, 2016 dalam Awani & Hariani, 2021). Berikut Rumusnya:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2** Kriteria Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Tinggi	100% s.d 75%	Delegatif
Sedang	75% s.d 50%	Partisipatif
Rendah	50% s.d 25%	Konsultatif
Rendah Sekali	25% s.d 0%	Instruktif

Sumber: (Tyas & Rani, 2022)

### c. Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Menurut (Faud, 2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Awani & Hariani, 2021). Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya (Awani & Hariani, 2021). Berikut rumusnya:

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3** Kriteria Efektivitas Terhadap PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
99% s.d 90%	Cukup Efektif
89% s.d 75%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Tyas & Rani, 2022)

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Sartika, (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Awani & Hariani, 2021). Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah (Awani & Hariani, 2021). Berikut rumusnya:

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4** Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Dibawah 100%	Efisien
100%	Berimbang
Diatas 100%	Tidak Efisien

Sumber: (Tyas & Rani, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Varian Pendapatan Daerah

**Tabel 5** Analisis Varian Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Varians Pendapatan	Kriteria
2020	Rp 2.428.579.503.649	Rp 2.362.959.267.805	102,78%	Baik
2021	Rp 2.644.780.935.777	Rp 2.482.148.757.721	106,55%	Baik
2022	Rp 2.787.105.058.803	Rp 2.824.140.344.471	98,69%	Kurang Baik
<b>Rata - Rata</b>			<b>102,67%</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dan 2021 varian pendapatan daerah kota bogor dapat dikatakan baik dikarenakan realisasi pendapatan daerahnya lebih besar dari yang dianggarkannya, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sehingga berada dalam kriteria kurang baik karena realisasi pendapatan daerahnya berada dibawah dari jumlah anggarannya.

Berdasarkan rata-ratanya, varian pendapatan kota bogor pada tahun 2020 – 2022 berada di kriteria baik sehingga dapat dikatakan realisasi pendapatan kota bogor dapat melebihi target anggaran yang ditetapkan.

**Analisis Rasio Kemandirian Daerah**

**Tabel 6** Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kota Bogor Tahun 2020 – 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Kemandirian	Kriteria
2020	Rp 872.017.242.152	Rp 2.428.579.503.649	35,91%	Konsultatif
2021	Rp 1.075.240.926.213	Rp 2.644.780.935.777	40,66%	Konsultatif
2022	Rp 1.147.623.045.709	Rp 2.787.105.058.803	41,18%	Konsultatif
<b>Rata - Rata</b>			<b>39,25%</b>	<b>Konsultatif</b>

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 – 2022 rasio kemandirian kota Bogor berada dalam kriteria konsultatif karena pendapatan daerahnya masih sangat besar dibandingkan pendapatan asli daerahnya yang artinya kota Bogor masih belum maksimal dalam mengelola sumberdaya nya sehingga dapat dikatakan masih sangat bergantung kepada pusat.

**Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 7** Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp 872.017.242.152	Rp 741.531.123.201	117,60%	Sangat Efektif
2021	Rp 1.075.240.926.213	Rp 914.550.650.320	117,57%	Sangat Efektif
2022	Rp 1.147.623.045.709	Rp 1.150.887.225.486	99,72%	Cukup Efektif
<b>Rata - Rata</b>			<b>111,63%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Berdasarkan tabel rasio efektivitas pendapatan asli daerah diatas pada tahun 2020 dan 2021 berada dalam kriteria sangat efektif yang artinya kota bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 99,72% karena anggaran pendapatan asli daerahnya lebih besar daripada realisasinya sehingga berada di kriteria cukup efektif.

Berdasarkan rata-rata, secara keseluruhan kota Bogor dapat dikatakan sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya karena rasio nya berada diatas 100%.

**Analisi Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 8** Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisiensi	Kriteria
2020	Rp 2.353.736.171.982	Rp 2.428.579.503.649	96,92%	Efisien
2021	Rp 2.636.065.820.905	Rp 2.644.780.935.777	99,67%	Efisien

2022	Rp 2.984.193.683.003	Rp 2.787.105.058.803	107,07%	Tidak Efisien
<b>Rata - Rata</b>			<b>101,22%</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Berdasarkan tabel rasio efisiensi pendapatan asli daerah diatas, pada tahun 2020 dan 2021 berada dalam kriteria efisien dengan persentase masing-masing 96,92% dan 99,67%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah nya. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan efisiensinya menjadi 107,07% dikarenakan realisasi belanja daerahnya naik menjadi lebih besar dari realisasi pendapatan daerahnya sehingga dapat dikatakan tidak efisien.

Berdasarkan rata-rata, secara keseluruhan rasio efisiensi pendapatan asli daerah kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 berada dalam kriteria tidak efisien.

### KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 - 2022 varian pendapatan kota Bogor sudah baik dengan persentase 102,67% yang artinya realisasi pendapatan daerah nya melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Rasio kemandirian daerah kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 masih rendah dengan persentase 39,25% yang artinya kota Bogor masih bergantung kepada pusat. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah kota Bogor pada tahun 2020 - 2022 sangat efektif dengan persentase 111,63% yang artinya kota Bogor merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan sangat efektif. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 tidak efisien dengan persentase 101,22% yang artinya pemerintah kota Bogor masih belum efisien dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 74–87. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Darmawan, A. N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Karyawan Putra Indonesia Malang. *Komastie: Jurnal Koperasi Dan ...*, 1(1), 70–77. <http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie/article/view/34>
- Fitra, H., & Efendi, Z. I. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Menara Ilmu*, XIV(01), 51–62.
- Krisniawati, Zulkarnain, M., & Yuliana. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR*. 5(1), 1–13.
- Machmoed, A. A. N., Kumenaung, A. G., Niode, A. O., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2021). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 03 Oktober 2021 ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA* Anisa Anastasya Nursanti Machmoed *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 03 Oktober 2021 Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu di era otonomi ini kemampuan keuangan daerah dan kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kabupaten yang berada di provinsi serta didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa*

- pemerintah Tahun 2010-2019 Sumber : BPKD Bolmut Tabel 1 . menunjukkan bahwa realisasi belanja modal di kabupaten Bolaang Anisa Anastasya Nursanti Machmoed. 21(03), 80-90.*
- Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). ( *Apbd* ) *Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ( Tahun 2016-2018 )*. 8(4), 805-814.
- Sejahtera, K., & Kabupaten, B. (2024). Analisis Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Koperasi Negeri. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 7(1), 1-14.
- Tyas, F. A. S., & Rani, U. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(3), 39-48.  
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i3.125>
- Zuhdi, F., Mawardi, M., & Hidayati, I. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 - 2021*. 12(02), 1-23.